



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **BAMBANG SUGIHARTO**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **446229**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 5.150.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000
2. Bangunan Seluas 24 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/10 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
6. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 150.000.000**

1. MOBIL, MERCEDES C200 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA****Rp. 165.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. 265.364.558****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 1.160.791.715****F. HARTA LAINNYA****Rp. 50.000.000****Sub Total****Rp. 6.941.156.273****III. HUTANG****Rp. 821.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 6.120.156.273**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.